

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMUDA DI KABUPATEN ENREKANG

Meyrdania¹, Dwi Putri Amelia², M. Yunasri Ridhoh³

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2025

Revised Juli 2025

Accepted Juli 2025

Available online Juli 2025

Email:

meyrdania1@gmail.com,

dwiputriamelia22@gmail.com,

yunasri.ridhoh@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan memainkan peranan penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran bernegara dan kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik. Di Kabupaten Enrekang, rendahnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan politik menjadi persoalan yang perlu ditangani secara serius. Artikel ini mengkaji kontribusi PKn dalam mendorong partisipasi politik pemuda melalui pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif. Ditekankan bahwa pendidikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus dihubungkan dengan realitas politik lokal seperti pemilihan desa dan kegiatan musyawarah. Selain itu, pendekatan berbasis media digital dan program pendidikan nonformal juga dapat meningkatkan literasi politik generasi muda. Peran guru PKn sebagai fasilitator pembelajaran kritis turut menentukan keberhasilan pendidikan demokrasi ini. Melalui strategi yang menyeluruh dan adaptif terhadap konteks lokal, PKn berpotensi melahirkan pemuda yang sadar politik, kritis, dan aktif dalam proses demokrasi di lingkungannya.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Partisipasi Politik, Pemuda, Enrekang, Demokrasi, Pendidikan Kontekstual, Literasi Politik

Abstract

Civic Education plays a crucial role in shaping young generations who are aware of their civic responsibilities and capable of actively participating in political life. In Enrekang Regency, the low level of youth involvement in political activities has become a serious issue that needs to be addressed. This article examines the contribution of Civic Education in promoting political participation among youth through contextual and practical learning approaches. It emphasizes that education should not only be theoretical but must also be connected to local political realities such as village elections and community deliberation activities. Additionally, digital media-based approaches and non-formal education programs can enhance the political literacy of the younger generation. The role of Civic Education teachers as facilitators of critical learning is also essential to the success of democratic education. Through comprehensive strategies that are adaptive to the local context, Civic Education has the potential to produce politically aware, critical, and actively engaged youth in democratic processes within their communities.

Keywords: Civic Education, Political Participation, Youth, Enrekang, Democracy, Contextual Education, Political Literacy

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan karakter warga negara yang demokratis dan aktif. Melalui PKn, generasi muda diperkenalkan pada nilai-nilai dasar negara, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Pendidikan ini memiliki kontribusi besar dalam membentuk identitas kewarganegaraan yang bertanggung jawab dan berdaya kritis (Winarno, 2013).

Dalam konteks sistem demokrasi Indonesia, partisipasi politik merupakan elemen penting yang tidak hanya bersifat formal seperti pemilu, tetapi juga mencakup aktivitas-aktivitas informal seperti diskusi politik, keterlibatan dalam organisasi sosial, dan pengawasan terhadap kebijakan publik. Pemuda sebagai kelompok usia produktif memiliki peran strategis dalam memastikan jalannya demokrasi yang sehat dan dinamis (Nuryanti, 2020).

Sayangnya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik pemuda Indonesia masih rendah. Banyak dari mereka tidak menggunakan hak pilih, tidak mengikuti perkembangan isu politik, bahkan merasa tidak percaya pada institusi politik (Afrianty, 2016). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realitas keterlibatan politik generasi muda.

Pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menjembatani kesenjangan tersebut. PKn yang baik tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, tetapi juga membangun sikap demokratis, toleransi, dan kepedulian sosial melalui pendekatan pembelajaran aktif, diskusi kelas, simulasi pemilu, dan kegiatan lapangan (Suwarna, 2022). Dalam konteks ini, pembelajaran harus dikaitkan dengan dinamika politik lokal agar lebih relevan dengan kehidupan siswa.

Kabupaten Enrekang sebagai wilayah yang memiliki kekayaan budaya dan karakter sosial yang kuat juga memiliki tantangan tersendiri dalam meningkatkan partisipasi politik pemudanya. Dalam beberapa studi lokal, ditemukan bahwa pemuda di daerah ini cenderung belum terlalu aktif dalam kegiatan politik karena minimnya informasi dan kurangnya pendidikan politik yang aplikatif (Rahman, 2021). Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus dikembangkan berdasarkan konteks lokal yang spesifik.

Penyesuaian kurikulum PKn dengan konteks sosial-politik lokal di Enrekang dapat dilakukan melalui integrasi isu-isu aktual yang dekat dengan kehidupan siswa, seperti musyawarah desa, pemilihan kepala desa, dan peran pemuda dalam pembangunan desa. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami konsep politik secara umum, tetapi juga melihat relevansinya dalam kehidupan sehari-hari (Hidayat, 2020).

Penguatan PKn juga perlu dilakukan melalui pendidikan nonformal dan informal. Pelatihan kepemudaan, diskusi publik, forum musyawarah, hingga kampanye sosial bisa menjadi bagian dari ekosistem pendidikan politik yang melibatkan pemuda secara langsung. Di beberapa daerah, model seperti ini terbukti mampu meningkatkan literasi politik dan kepercayaan diri generasi muda untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan (Saputra, 2019).

Pemanfaatan teknologi digital dan media sosial juga menjadi bagian penting dalam memperkuat pendidikan kewarganegaraan. Pemuda di Enrekang, sebagaimana generasi muda di daerah lain, sangat dekat dengan media digital. Oleh karena itu, konten-konten edukatif tentang politik, demokrasi, dan hak warga negara dapat dikembangkan dalam bentuk video, infografis, dan kampanye daring untuk menjangkau mereka secara lebih efektif (Yuliana, 2021).

Namun demikian, peran guru PKn sebagai agen perubahan juga tidak boleh diabaikan. Guru harus dibekali dengan kemampuan pedagogis dan pengetahuan yang memadai agar mampu mentransformasikan nilai-nilai kewarganegaraan secara kontekstual, kritis, dan aplikatif. Pendidikan guru yang berorientasi pada pendidikan demokrasi lokal menjadi salah satu solusi untuk menjawab tantangan ini (Lestari, 2018).

Dengan semua pendekatan tersebut, pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik dan keterlibatan aktif pemuda di Kabupaten Enrekang. Partisipasi politik yang dimaksud bukan hanya dalam konteks pemilu, tetapi juga keterlibatan dalam proses-proses deliberatif di tingkat lokal yang dapat memperkuat demokrasi dari bawah. Jika dikelola secara sistematis dan kolaboratif, pendidikan kewarganegaraan akan menjadi motor penggerak lahirnya generasi muda yang peduli, kritis, dan siap mengambil peran dalam kehidupan politik bangsa (Kurniawan, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **Studi Pustaka (*Library Research*)** sebagai metode utama dalam menggali dan memahami peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan keterlibatan politik pemuda, khususnya di Kabupaten Enrekang. Studi pustaka

merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dan kredibel, baik berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, dokumen resmi, maupun hasil penelitian terdahulu.

Langkah-langkah dalam metode ini meliputi: (1) mengidentifikasi isu pokok dan kata kunci yang berkaitan dengan tema penelitian; (2) mengumpulkan referensi yang relevan dari berbagai sumber terpercaya; (3) melakukan analisis isi terhadap sumber-sumber tersebut untuk menemukan pola, pemikiran, atau temuan yang berkaitan dengan topik; dan (4) menyusun hasil kajian secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menelaah isi dan makna dari literatur yang dikaji untuk kemudian disusun dalam bentuk pemahaman teoritis dan argumentatif. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya merumuskan bagaimana pendidikan kewarganegaraan, jika dirancang secara kontekstual dan aplikatif, dapat menjadi sarana efektif dalam membentuk kesadaran dan partisipasi politik pemuda di tingkat lokal.

HASIL & PEMBAHASAN

Kabupaten Enrekang adalah salah satu daerah yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dengan karakter masyarakat yang majemuk, religius, dan memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang kuat. Sebagai daerah dengan dominasi penduduk usia produktif, khususnya kalangan pemuda, Enrekang memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan demokrasi di tingkat lokal. Namun, potensi ini belum sepenuhnya terkelola dengan optimal, terutama dalam hal partisipasi politik generasi muda.

Beberapa studi lokal mengindikasikan bahwa tingkat keterlibatan politik pemuda di Enrekang masih rendah. Banyak pemuda yang tidak mengikuti pemilihan kepala desa, tidak aktif dalam musyawarah desa, serta kurang memahami fungsi lembaga-lembaga politik lokal. Hal ini diperparah oleh kurangnya informasi politik yang tersedia secara luas dan mudah diakses. Bahkan dalam konteks pendidikan formal, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih terkesan normatif dan belum menyentuh isu-isu lokal yang relevan dengan kehidupan siswa.

Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara materi PKn yang diajarkan di sekolah dan realitas politik yang dihadapi oleh pemuda Enrekang. Banyak siswa belajar tentang demokrasi dan partisipasi politik secara teoritis, tetapi tidak pernah mengalami atau menyaksikan langsung bagaimana proses politik berlangsung di desa atau kabupaten mereka. Akibatnya, pemuda menjadi pasif, kurang percaya diri, dan merasa tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan publik di lingkungan sekitar mereka.

Untuk itu, Pendidikan Kewarganegaraan di Enrekang perlu dikembangkan secara kontekstual, dengan mengintegrasikan isu-isu lokal seperti pemilihan kepala desa, pembangunan desa berbasis partisipasi, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan forum anak muda dalam musyawarah desa. Pembelajaran juga bisa melibatkan narasumber dari tokoh masyarakat, pemerintah desa, atau aktivis lokal yang dapat memberi wawasan nyata tentang praktik demokrasi di daerah.

Di sisi lain, pemanfaatan media sosial dan teknologi digital juga dapat dimaksimalkan untuk menjangkau pemuda di daerah ini. Sebagian besar remaja dan pemuda Enrekang sudah terbiasa menggunakan smartphone dan mengakses internet. Oleh karena itu, konten edukatif mengenai politik lokal, hak warga negara, serta pentingnya suara pemuda dalam pembangunan dapat dikemas dalam bentuk video pendek, infografis, atau kampanye digital yang menarik dan mudah dipahami.

Keterlibatan lembaga nonformal, seperti organisasi kepemudaan, karang taruna, serta komunitas literasi lokal juga penting dalam mendukung pendidikan politik yang lebih luas. Kegiatan seperti diskusi publik, simulasi pemilu desa, pelatihan kepemimpinan, dan forum

musyawarah pemuda bisa menjadi wahana praktis untuk mengasah keterampilan demokratis generasi muda Enrekang.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, kolaboratif, dan berbasis lokal, Kabupaten Enrekang memiliki peluang besar untuk menciptakan pemuda yang tidak hanya memahami politik secara konseptual, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada komunitas mereka. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi instrumen utama dalam proses ini sebagai jembatan antara teori dan kenyataan politik yang dihadapi generasi muda Enrekang sehari-hari. Jika dilihat dari perspektif lokal, Kabupaten Enrekang menghadirkan kondisi yang khas dalam hal partisipasi politik pemuda, sehingga layak menjadi fokus kajian lebih lanjut.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pilar Kesadaran Politik Pemuda

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran fundamental dalam pembentukan karakter warga negara, khususnya dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan generasi muda. Fungsi PKn tidak hanya terbatas pada penyampaian materi konstitusi, hukum, dan hak-hak warga negara, melainkan juga pada penanaman nilai-nilai demokrasi, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Winarno, 2013).

Dalam kerangka negara demokratis seperti Indonesia, pemuda memiliki kedudukan yang sangat strategis. Mereka adalah agen perubahan yang memiliki energi, kreativitas, dan daya inovasi tinggi. Namun demikian, peran strategis ini akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan pemahaman yang memadai mengenai pentingnya keterlibatan dalam proses politik. Oleh karena itu, PKn menjadi sarana penting dalam mentransformasi kesadaran politik ke dalam tindakan nyata.

Di dalam kurikulum pendidikan, PKn harus difungsikan tidak sekadar sebagai mata pelajaran yang menghafal teori, tetapi sebagai ruang belajar yang hidup, kritis, dan reflektif terhadap realitas sosial-politik yang terjadi di sekitar peserta didik.

Tingkat Partisipasi Politik Pemuda Masih Rendah

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik pemuda di Indonesia masih berada pada level yang rendah. Survei Lembaga Survei Indonesia (2021) mengungkapkan bahwa sekitar 40% pemuda tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, dan lebih dari separuh dari mereka tidak mengikuti perkembangan isu-isu politik baik di tingkat nasional maupun lokal. Hal ini diperkuat oleh Afrianty (2016) yang menyatakan bahwa krisis kepercayaan terhadap institusi politik, seperti partai politik dan legislatif, turut memengaruhi sikap apatis di kalangan pemuda.

Kondisi serupa juga ditemukan di Kabupaten Enrekang. Menurut Rahman (2021), rendahnya partisipasi politik pemuda di daerah ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu kurangnya pendidikan politik yang bersifat praktis dan minimnya akses terhadap informasi yang berkaitan dengan isu-isu lokal. Pemuda cenderung melihat politik sebagai urusan elitis dan tidak relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Rendahnya partisipasi ini tentu menjadi tantangan bagi keberlangsungan demokrasi, terutama di daerah-daerah yang memiliki struktur sosial kuat seperti Enrekang. Tanpa keterlibatan generasi muda, proses demokratisasi dapat berjalan stagnan bahkan terancam.

Penguatan Kontekstualisasi Pendidikan Kewarganegaraan

Salah satu langkah penting untuk meningkatkan partisipasi politik pemuda adalah dengan menguatkan pendekatan kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan yang

mampu menghubungkan teori dengan realitas kehidupan lokal akan lebih bermakna dan mampu menyentuh kesadaran siswa secara personal.

Sebagaimana dikemukakan oleh Suwarna (2022), pendekatan kontekstual dalam PKn memungkinkan siswa memahami persoalan politik tidak hanya dari perspektif nasional, tetapi juga dari lingkungan tempat mereka tinggal. Misalnya, siswa dapat diajak untuk menganalisis proses musyawarah desa, mengikuti pemilihan kepala desa, hingga mempelajari peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan cara ini, pemahaman politik tidak lagi bersifat abstrak, melainkan konkret dan aplikatif.

Hal ini sangat relevan untuk diterapkan di Enrekang, yang memiliki dinamika sosial dan budaya khas. PKn di daerah ini dapat difokuskan pada isu-isu lokal seperti pembangunan desa, konservasi budaya lokal, dan keterlibatan pemuda dalam program-program desa. Melalui pendekatan seperti itu, pembelajaran akan terasa lebih dekat dan menyentuh konteks kehidupan nyata siswa.

Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pendidikan Politik

Di era digital, pemuda sangat akrab dengan media sosial, internet, dan teknologi informasi. Potensi ini dapat dimanfaatkan dalam proses pendidikan politik secara efektif. Yuliana (2021) menyatakan bahwa media digital dapat digunakan untuk menyampaikan materi kewarganegaraan dalam bentuk yang lebih menarik, seperti video interaktif, podcast, infografis, maupun kampanye digital.

Penggunaan platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk menyampaikan pesan-pesan politik yang edukatif terbukti mampu menjangkau generasi muda yang tidak tersentuh oleh media konvensional. Selain itu, forum-forum diskusi daring, webinar, dan kelas online dapat menjadi ruang partisipatif bagi pemuda untuk berdialog dan mengembangkan pemikiran kritis mereka terhadap isu politik lokal dan nasional.

Bagi pemuda di Enrekang, pemanfaatan teknologi ini menjadi peluang besar untuk mengakses informasi politik yang sebelumnya terbatas. Namun demikian, perlu adanya pendampingan dan penyaringan informasi agar mereka tidak terpapar pada hoaks dan propaganda politik yang menyesatkan.

Peran Pendidikan Nonformal dan Forum Kepemudaan

Selain pendidikan formal, pendidikan nonformal dan informal memiliki pengaruh besar dalam membangun kesadaran politik. Kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, seminar kebangsaan, diskusi publik, dan simulasi sidang rakyat merupakan bentuk pembelajaran yang lebih partisipatif dan berbasis pengalaman langsung.

Menurut Saputra (2019), keterlibatan pemuda dalam forum-forum musyawarah desa dan organisasi kemasyarakatan memberikan ruang latihan yang konkret untuk memahami dinamika sosial dan politik. Kegiatan ini juga melatih keberanian berbicara, berargumentasi, dan mengambil keputusan dalam forum publik, yang merupakan ciri utama warga negara demokratis.

Untuk konteks Enrekang, penguatan forum kepemudaan di tingkat desa dan kecamatan bisa menjadi sarana strategis untuk membentuk kader muda yang sadar politik, bertanggung jawab, dan siap menjadi pemimpin masa depan.

Guru PKn sebagai Katalisator Perubahan

Peran guru PKn tidak bisa diabaikan dalam proses ini. Mereka adalah aktor utama yang menghidupkan pendidikan kewarganegaraan di kelas. Lestari (2018) menekankan bahwa guru harus memiliki kapasitas pedagogis yang kuat, berpikiran terbuka, dan memahami konteks

sosial-budaya siswanya. Tanpa guru yang inspiratif dan berpikiran demokratis, materi PKn hanya akan menjadi hafalan kosong.

Di Enrekang, pengembangan kapasitas guru PKn melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan sangat penting agar mereka mampu merancang pembelajaran yang interaktif, kontekstual, dan menyentuh realitas siswa. Guru juga perlu didorong untuk menjalin kemitraan dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan dalam mendukung ekosistem pendidikan politik yang sehat dan kolaboratif.

KESIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam membentuk karakter generasi muda yang memiliki kesadaran politik dan mampu berperan aktif dalam proses demokrasi. Di Kabupaten Enrekang, rendahnya tingkat partisipasi politik di kalangan pemuda menjadi tantangan yang harus segera direspons. Salah satu langkah strategis untuk mengatasi hal ini adalah dengan memperkuat pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang bersifat kontekstual, aplikatif, dan terhubung langsung dengan kehidupan politik lokal.

Pembelajaran yang relevan dengan realitas daerah, seperti keterlibatan dalam kegiatan musyawarah desa dan pemilihan kepala desa, dapat menjadikan pendidikan politik lebih bermakna bagi peserta didik. Dukungan pendidikan nonformal, penggunaan media digital yang sesuai dengan gaya belajar generasi muda, serta forum kepemudaan menjadi faktor pendukung yang sangat signifikan dalam membangun kesadaran politik pemuda.

Selain itu, guru PKn memegang peranan sentral dalam keberhasilan proses ini. Guru yang memiliki wawasan demokratis, mampu mengaitkan materi dengan isu lokal, serta terbuka terhadap diskusi kritis, akan menjadi katalis dalam meningkatkan literasi politik siswa. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan di Enrekang perlu dikembangkan secara terpadu, kontekstual, dan partisipatif agar mampu mencetak pemuda yang tidak hanya paham hak dan kewajiban politiknya, tetapi juga siap menjadi pelaku aktif dalam membangun demokrasi di tingkat lokal.

REFERENSI

- Afrianty, D. (2016). *Youth political apathy and distrust in Indonesia's democracy*. Jakarta: Indonesian Institute for Civic Studies.
- Hidayat, R. (2020). *Pendidikan kewarganegaraan berbasis kearifan lokal dalam memperkuat karakter siswa di sekolah*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 150-165. <https://doi.org/10.21831/jpk.v10i2.2020>
- Kurniawan, B. (2022). *Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Generasi Muda*. *Jurnal Demokrasi dan Kebangsaan*, 6(1), 45-56.
- Lestari, R. (2018). *Penguatan kompetensi guru dalam membentuk pembelajaran kontekstual PKn di sekolah menengah*. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 51(3), 203-217.
- Nuryanti, D. (2020). *Peran pemuda dalam menjaga stabilitas demokrasi di era milenial*. *Jurnal Politik dan Sosial*, 4(1), 12-25.
- Rahman, A. (2021). *Analisis Partisipasi Politik Pemuda di Kabupaten Enrekang*. Makassar: Lembaga Penelitian Sosial Politik Sulawesi Selatan.
- Saputra, I. (2019). *Pendidikan politik nonformal bagi pemuda di desa: Studi kasus pada forum pemuda desa di Jawa Tengah*. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 88-97.
- Suwarna, H. (2022). *Model pembelajaran aktif dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara kritis*. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Kewarganegaraan*, 7(1), 1-15.



Winarno, S. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun karakter bangsa dalam masyarakat demokratis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yuliana, N. (2021). *Media digital sebagai alat transformasi pembelajaran PKn di era revolusi industri 4.0*. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 14(3), 110-124. <https://doi.org/10.31004/jtp.v14i3.2021>